



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN PENYAKIT
TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

5. Penanggulangan ...

5. Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB adalah Program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi TB, sebagai bentuk komitmen. Pemerintah Kota dalam penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya Penanggulangan TB.

BAB III

ISU STRATEGIS

Pasal 4

Isu Strategis dalam Penanggulangan Penyakit TB, antara lain:

- a. penemuan kasus TB yang masih rendah;
- b. belum dilaksanakan pencegahan dan pengobatan TB secara optimal;
- c. masih banyak pasien TB tidak diketahui status HIV-nya;
- d. penderita *Diabetes Militus* (DM) beresiko 3 sampai 4 kali untuk terinfeksi TB;
- e. penderita ...

- e. penderita TB komorbid DM beresiko mengalami kegagalan pengobatan dan memicu untuk menjadi TB Kebal Obat;
- f. masih rendah keberhasilan pengobatan TB;
- g. belum banyak penelitian tentang TB; dan
- h. hasil pemantauan mutu eksternal laboratorium belum baik.

BAB IV INDIKATOR DAN TARGET

Pasal 5

- (1) Indikator Penanggulangan TB terdiri dari indikator dampak, indikator utama, dan indikator operasional.
- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TB, yang akan diukur dan dianalisis secara berkala, yaitu:
 - a. angka prevalensi TB;
 - b. angka insidensi TB; dan
 - c. angka mortalitas TB.
- (3) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian strategi nasional penanggulangan TB tingkat Kota, yaitu:
 - a. cakupan pengobatan semua kasus TB;
 - b. angka notifikasi semua kasus TB yang diobati;
 - c. angka keberhasilan pengobatan TB semua kasus;
 - d. cakupan penemuan kasus TB resistan obat;
 - e. angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat;
 - f. persentase pasien TB yang mengetahui status HIV; dan
 - g. persentase pasien TB mengetahui status DM.

(4) Indikator ...

- (4) Indikator operasional merupakan indikator pendukung untuk tercapainya indikator dampak dan indikator utama dalam upaya mencapai keberhasilan program penanggulangan TB tingkat Kota, yaitu:
- a. jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati;
 - b. persentase kasus pengobatan ulang TB yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molukuler/konvensional; persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua;
 - c. persentase Pasien TB-HIV dapat ARV selama pengobatan TB;
 - d. persentase pasien TB-DM yang mendapatkan pengobatan TB;
 - e. keberhasilan pengobatan TB pada pasien TB-DM;
 - f. persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang;
 - g. persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti Pemantauan Mutu Eksternal (PME) dengan hasil baik;
 - h. cakupan penemuan kasus TB anak;
 - i. persentase anak usia <5 tahun mendapat pengobatan pencegahan dibandingkan estimasi anak <5 tahun yang memenuhi syarat diberikan pengobatan pencegahan.

Pasal 6

Target Indikator utama dan Target indikator operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 7

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB dijabarkan dalam strategi, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI ...

BAB VI
PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB meliputi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta, Dokter Praktik Mandiri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Dinas Sosial Kota Pasuruan, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait lainnya.

BAB VII
PERAN SERTA

Pasal 8

- (1) Masyarakat umum, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, instansi vertikal dan/atau badan hukum dapat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melaksanakan sosialisasi di lingkungannya;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan program kegiatan penunjang; dan
 - c. memberikan fasilitasi.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran ...

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap penelitian yang memerlukan data di lingkup Pemerintah Kota dalam rangka penanggulangan TB dapat dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Penelitian dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang memberi data.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TUBERKULOSIS

TARGET INDIKATOR UTAMA DAN TARGET INDIKATOR OPERASIONAL

A. TARGET INDIKATOR UTAMA

NO	INDIKATOR	DASAR	TARGET PER TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/CDR)	723 100%	729 100%	748 100%	748 100%	744 100%	
2	Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate (CNR) per 100.000 penduduk	418 100 %	418 100 %	420 100 %	420 100 %	420 100 %	
3	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
4	Cakupan penemuan kasus TB resistan obat absolut)	23 100%	23 100%	23 100%	23 100%	23 100%	
5	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% Succes rate) Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Persentase Penderita TB mengetahui status DM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

B. TARGET INDIKATOR OPERASIONAL

NO	INDIKATOR	DASAR	TARGET PER TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati	729	729	729	729	729	
2	Persentase kasus TB pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molukuler/metode	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase kasus TB resistan obat yang memulai pengobatan lini kedua (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase Pasien TB-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TB (%)	100 %	100 %	100 %	100 %		
5	Persentase pasien TB-DM yang mendapatkan pengobatan TB	100 %	100 %	100 %	100 %	100	
6	Keberhasilan pengobatan TB pada pasien TB-DM	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	

WALIKOTA PASURUAN

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENANGGULANGAN PENYAKIT
 TUBERKULOSIS

STRATEGI I : PENGUATAN KEPEMIMPINAN PROGRAM TB KOTA PASURUAN

No	Strategi-Program-Kegiatan	Tahun					Utama	Pendukung	Pos Dana
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Penguatan Kepemimpinan Program TB kota Pasuruan								
	1.1	Penyusunan dan penetapan kebijakan atau peraturan, yang dibutuhkan untuk penguatan program penanggulangan TB kota pasuruan				DKK	Bagian Hukum Setda; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Perangkat Daerah teknis terkait kebijakan-regulasi nya ;Organisasi Profesi BPJS, GF	APBD-SKPD Mitra	
		1.1.1	tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit						
		1.1.2	tentang SPM bidang kesehatan						
		1.1.3	tentang tatalaksana kasus TB sesuai standar bagi seluruh faskes						
		1.1.4	tentang wajib lapor kasus TB bagi seluruh faskes						
		1.1.5	tentang dukungan ekonomi bagi pasien TB (TB sensitif obat / TB resisten obat / B-HIV)						
		1.1.6	tentang perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan yang sakit TB						
		1.1.7	tentang persyaratan PPI dalam perijinan pembangunan faskes						

STARTEGI II : PENINGKATAN AKSES LAYANAN TOSS-TB YANG BERMUTU

2	Peningkatan akses layanan TOSS-TB yang bermutu			
	2.1	Intensifikasi penemuan kasus TB (TB sensitif obat, TB resisten obat, TB-HIV)		
		2.1.1 Penguatan kolaborasi layanan di internal faskes (RS-PKM Balai Pengobatan, Klinik), antar unit layanan faskes, melalui : investigasi kontak kasus TB, skrining TB, rujukan terduga TB	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes , , GF. APBD-SKPD Mitra
		2.1.2 Sinkronisasi program di internal DKK antar UPT-UPT DKK, melalui rapat koordinasi rutin berkala	DKK	UPT-UPT , , GF APBD-SKPD Mitra
		2.1.3 Pelibatan semua SKPD kota Pasuruan membantu sosialisasi TB dan rujukan terduga TB, minimal di lingkungan SKPD nya	DKK	Perangkat Daerah Kota Pasuruan , , GF APBD-SKPD Mitra
		2.1.4 Pelibatan organisasi profesi (IDI, PDPI, PAPDI, IDAI, IAI, ILKI, IBI, PPNI, IAKSMI, dll), dibentuk dalam wadah Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) dengan bentuk kegiatan sesuai bidang keahlian / profesinya, yang diawali dengan pemetaan anggota dan sosialisasi tentang TB kepada anggota	DKK	Organisasi Profesi , GF APBD-SKPD Organisasi Mitra
		2.1.5 Keterlibatan lembaga kementerian lain yang terkait :	DKK	KEMENHUKHAM,KEMENAG , APBD-SKPD Organisasi Mitra
		Untuk penemuan kasus TB di tempat khusus (BAPAS-RUTAN , pondok pesantren, asrama) , melalui : sosialisasi TB, skrining TB, rujukan terduga TB	DKK	TNI-POLRI ; KEMENHUKHAM,KEMENAG ,TNI-POLRI, , GF
		2.1.6 Pelibatan organisasi masyarakat dan organisasi pasien ; untuk penemuan kasus TB secara aktif berbasis keluarga (dasawisma) dan masyarakat (UKBM) : sosialisasi TB, investigasi kontak dan penjangkauan, rujukan terduga TB	DKK	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda; Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Organisasi Masyarakat, Organisasi Pasien APBD-SKPD Organisasi Mitra

		2.1.7	Penerapan sistem rujukan spesimen yang efektif ; dari semua faskes ke RS dengan kemampuan tes cepat molekuler, yang di dukung oleh ketersediaan logistik pengemasan spesimen dan transportasi spesimen,	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes , , GF, Faskes	APBD-SKPD
		2.1.8	Bimbingan teknis-supervisi dan Monitoring evaluasi, atas pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus TB (TB sensitif obat / TB resisten obat / TB- HIV)	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes Organisasi Profesi , GF Manajemen dan Fungsional faskes Organisasi Profesi , GF Organisasi Mitra Mendukung keberlangsungan pengobatan pasien TB (TB sensitif obat / TB resisten obat / TB- HIV)	APBD-SKPD
		2.1.9	Penguatan Kolaborasi TB-DM	DKK	Posbindu, UPT –UPT , RS, Klinik, DPM	APBD-SKPD
	2.2		Mendukung keberlangsungan pengobatan pasien TB (TB sensitif obat / TB resisten obat / TB-HIV)	DKK	Manaje dan faskes , , Fungsio nal GF	APBD-SKPD Faskes Mitra
		2.2.1	Mendekatkan pelayanan TB ke wilayah tinggal pasien TB melalui : rujuk balik dan desentralisasi- serah terima pasien TB, dari FKRTL ke FKTP yang terdekat dengan wilayah tinggal pasien TB	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes , , GF	APBD-SKPD Organisasi Mitra
		2.2.2	Pelibatan organisasi masyarakat dan organisasi pasien ; untuk pendampingan pasien TB menelan obat (pengawas menelan obat / PMO), dan untuk memberikan dukungan psiko- sosial bagi pasien TB ; melalui : kunjungan rumah pasien TB, pelacakan mangkir, diskusi kelompok terarah (FGD)	DKK	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda ; Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ;Organisasi Pasien	APBD-SKPD Organisasi Mitra
		2.2.3	Pemberian dukungan ekonomi bagi pasien TB untuk meminimalkan hambatan ekonomi, agar pasien TB mau berobat dan	DKK	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda ; Pemberdayaan	APBD-SKPD Faskes Mitra

			berkesinambungan pengobatannya sampai dengan sembuh, melalui : pemberian enabler, penyediaan rumah singgah, pemberian ketrampilan, pemberian modal tanpa bunga, bantuan pemasaran hasil		Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Mitra CSR.	
		2.2.4	Penguatan manajemen tatalaksana kasus TB untuk menjamin tatalaksana kasus TB sesuai standar yang telah ditetapkan, melalui : memfungsikan manajer kasus, melakukan telaah kasus sulit, melakukan telaah kohort, pemakaian regimen obat TB yang lebih pendek masa pengobatannya, meningkatkan kecepatan respon atas keluhan dan tatalaksana efek samping yang efektif	DKK	Manajemen dan Fungsi faskes, Organisasi Profesi, GF	APBD-SKPD Faskes Mitra
		2.2.5	Bimbingan teknis-supervisi dan monitoring evaluasi, untuk keberlangsungan pengobatan kasus TB (TB sensitif obat / TB resisten obat /TB-HIV)	DKK	Manajemen dan Fungsi faskes, Organisasi Profesi , GF	APBD-SKPD Faskes Mitra
	2.3		Peningkatan mutu layanan laboratorium TB (mikroskopik, TCM dan biakan)	DKK	Badan Perencanaan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset , GF	APBD-SKPD APBD-SKPD Faskes Mitra
		2.3.1	Meningkatkan status menjadi PPM	PSDKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, GF	APBD-SKPD Faskes Mitra
		2.3.2	Pengembangan kemampuan diagnostik laboratorium faskes dengan sarana fasilitas teknologi terkini : mikroskop LCD, TCM, MGIT	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Manajemen faskes yang dikembangkan ,CTR, GF.	APBD-SKPD Faskes Mitra

			Renovasi bangunan laboratorium faskes, untuk memenuhi persyaratan biosafety level yang dibutuhkan	DKK	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Manajemen faskes yang dikembangkan CTP	APBD-SKPD Faskes Mitra
		2.3.3	Pemantapan mutu laboratorium TB melalui pemantauan mutu internal (PMI) dan pemantauan mutu eksternal (PME), di seluruh laboratorium TB	DKK	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Manajemen faskes	APBD-SKPD Faskes, Mitra
		2.3.4	Bimbingan teknis-supervisi dan monitoring evaluasi, untuk peningkatan mutu layanan laboratorium TB	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes Organisasi Profesi ; GF	APBD-SKPD Organisasi Mitra

STRATEGI-3 : PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO

3.	Memastikan penerapan PPI-TB di faskes					
	3.1	Pengobatan pencegahan TB		DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi ; , GF	APBD-SKPD ; Organisasi ; Faskes ; Mitra
		3.1.1	Penerapan PP-INH pada anak sehat terkontak TB yang merupakan tindak lanjut penerapan investigasi kontak kasus TB	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi ; , GF	APBD-SKPD Organisasi ; Faskes ; Mitra
		3.1.2	Penerapan PP-INH pada ODHA yang merupakan tindak lanjut hasil negatif penerapan skrining TB pada ODHA	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi ; , GF	APBD-SKPD Organisasi ; Faskes ; Mitra
		3.1.3	Pemberian imunisasi BCG pada bayi untuk mengurangi resiko kejadian TB berat pada anak	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi	APBD-SKPD Organisasi Faskes
		3.1.4	Penerapan skrining TB pada kelompok DM	DKK	UPT-UPT; RSUD; RS Swasta; Klinik Swasta/Pemerintah; Dokter Praktek Mandiri	APBD-SKPD BPJS

		3.1.5	Penerapan Skrining DM pada penderita TB	DKK	UPT-UPT; RSUD; RS Swasta; Klinik Swasta/Pemerintah; Dokter Praktek Mandiri	APBD-SKPD BPJS
		3.1.6	Pemberian Pengobatan TB pada Penderita TB-DM	DKK	UPT-UPT; RSUD; RS Swasta; Klinik Swasta/Pemerintah; Dokter Praktek Mandiri	APBD-SKPD BPJS
		3.1.7	Pemberian Pengobatan DM pada Penderita TB-DM	DKK	UPT-UPT; RSUD; RS Swasta; Klinik Swasta/Pemerintah; Dokter Praktek Mandiri	APBD-SKPD BPJS
	3.2	Memastikan penerapan PPI-TB di faskes				
		3.2.1	Penerapan kewaspadaan standar untuk menurunkan risiko penularan TB, dengan mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi, kebersihan tangan, pemakaian APD, etika batuk, dan kebersihan lingkungan	DKK	Manajemen dan Fungsional ; faskes ;Organisasi Profesi , GF	APBD-SKPD Organisasi ;Faskes ;Mitra
		3.2.2	Penerapan kewaspadaan transmisi airborne untuk memutus rantai transmisi kuman TB, dengan memastikan pertukaran udara ruang layanan TB di faskes > 12 x / per jam dan penerapan Tempo di faskes	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi , GF	APBD-SKPD Organisasi ; Faskes ;Mitra
		3.2.3	Skrining TB pada petugas faskes	DKK	Manajemen faskes ; Organisasi Profesi ; , GF	APBD-SKPD Profesi ;Faskes ;Mitra
	3.3	Pengendalian dan pencegahan TB di masyarakat				
		3.3.1	Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap penanggulangan TB, dalam bentuk promosi yang tersistem tentang TB, melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial	DKK	Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, ;Dinas Komunikasi-Informasi dan Statistik .	APBD-SKPD , Mitra
		3.3.2	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan berbasis keluarga (dasawisma) dan masyarakat (UKBM), dan pemantauan 16 indikator perilaku hidup bersih dan sehat	DKK	Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan, ; Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ; Dinas Pemuda , Pariwisata dan Olah Raga ; Dinas Pendidikan	APBD-SKPD Organisasi ; Mitra

					dan Kebudayaan ; Organisasi Masyarakat, Organisasi pasien , , GF	
		3.3.3	Menyediakan lingkungan hidup yang sehat bagi pasien TB dalam bentuk dukungan renovasi rumah agar layak huni bagi pasien TB tidak mampu, penyediaan air bersih, penyediaan sarana fasilitas sanitasi	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan ; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Organisasi Masyarakat ; Kecamatan-Kelurahan ; , GF.	APBD-SKPD Organisasi ; Mitra

STRATEGI-4 : PENINGKATAN KEMITRAAN MELALUI FORUM KOORDINASI TB

4	Peningkatan Kemitraan Melalui Forum Koordinasi TB				
	4.1.	Pembentukan Forum Koordinasi TH			
		4.1.1	Pembentukan forum koordinasi TB tingkat faskes melalui revitalisasi tim DOTS faskes menjadi forum koordinasi TB-PMTM (Penyakit Menular dan Tidak Menular) di tingkat faskes, beranggotakan unit layanan terkait, yang berfungsi optimal (ada rencana kerja, pelaksanaan dan monitoring evaluasi)	DKK	Manajemen dan Organisasi Profesi ; CRS, GF ; Faskes ; Mitra
		4.1.2	Pembentukan forum koordinasi TB tingkat OPD untuk sinkronisasi kegiatan program antar UPT-UPT di OPD yang mendukung penanggulangan TB, dan dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaannya	DKK	Semua UPT Kota Pasuruan ; , GF
		4.1.3	Pembentukan forum koordinasi TB di tingkat kota melalui revitalisasi Tim PPM kota Pasuruan menjadi forum koordinasi TB-PMTM (Penyakit Menular-Tidak Menular) di tingkat kota, beranggotakan semua pemangku kepentingan, swasta dan mitra terkait	DKK	Semua Perangkat Daerah kota Pasuruan ; Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pasien, lembaga kementerian lain terkait:

		layanan TB Kota Pasuruan, yang berfungsi optimal (ada rencana kerja, pelaksanaan dan monitoring evaluasi)		KEMEHUKHAM, KEMENAG, TNI-POLRI, BPJS ;, GF ;	
--	--	--	--	--	--

STRATEGI-5 . PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TB

5	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Penanggulangan TB Memaksimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan TB TB sensitif obat/TB resisten obat/TB-HIV)				
	5.1	Memaksimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan TB (TB sensitif obat/TB resisten obat/TB-HIV)			
		5.1.1 Pemetaan lembaga swadaya masyarakat/upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang terlibat dalam penanggulangan TB, untuk mengetahui : bentuk, jumlah, kapasitas organisasi dan kapasitas manajemen dari lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan TB, yang akan di tindak lanjuti dengan : peningkatan kapasitas yang diperlukan, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan	DKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, GF.	APBD-SKPD ; Mitra
		5.1.2 Pemetaan pasien dan mantan pasien TB untuk mengidentifikasi: jumlah, pemahaman tentang TB, dan kesediaannya untuk terlibat dalam penanggulangan TB, yang akan di tindak lanjuti dengan: peningkatan kapasitas (sebagai kader/ pendidik sebaya), dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku terkait TB	DKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, GF.	APBD-SKPD ; Mitra
	5.2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku terkait TB			

	5.2.1	Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap penanggulangan TB, dalam bentuk promosi yang tersistem tentang TB, melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial	DKK	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, GF.	APBD-SKPD ; Mitra.
	5.2.2	Pemberdayaan keluarga pasien TB untuk mampu melaksanakan tugas kesehatan keluarga meliputi kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan TB, mengambil keputusan untuk tindakan yang tepat, memberi perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan lingkungan fisik rumah yang menunjang kesehatan dan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat	DKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, GF.	APBD-SKPD : Mitra ;
5.3		Memfasilitasi kegiatan kader / pendidik sebaya dalam penanggulangan TB			
	5.3.1	Penyuluhan tentang TB kepada masyarakat oleh kader / pendidik sebaya	DKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, GF.	APBD-SKPD ; Mitra.
	5.3.2	Investigasi kontak dan penjangkauan	DKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, GF.	APBD-SKPD ; Mitra
	5.3.3	Pendampingan dan dukungan psiko- sosial	DKK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Kelurahan, GF.	APBD-SKPD ; Mitra

STRATEGI-6 : PENGUATAN MANAJEMEN PROGRAM MELALUI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

6	Penguatan Manajemen Program melalui Penguatan Sistem Kesehatan				
	6.1	Penguatan Manajemen SDM			
		6.1.1	Pembentukan tim pelatih TB kota Pasuruan yang beranggotakan para tenaga terlatih sebagai narasumber untuk berbagai aspek ilmu dan ketrampilan	DKK	Organisasi Profesi; APBD-GF . APBD-SKPD
		6.1.2	Penguatan manajemen SDM meliputi : perencanaan, rekrutmen, penempatan dan peningkatan kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan SDM pengelola P2TB kota Pasuruan, dengan jumlah cukup dan memiliki kapasitas yang memadai (terlatih/terkini pengetahuan TB nya	DKK	Badan Kepegawaian Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Tim Pencatat TB Kota; Manajemen faskes; GF. APBD-SKPD Faskes ; Mitra
	6.2	Logistik Layanan TB			
		6.2.1	Penguatan manajemen logistik layanan TB meliputi : perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi untuk pemenuhan kebutuhan logistik layanan TB, dengan jenis sesuai (vaksin, obat, bahan habis pakai, form pencatatan pelaporan, media KIE, dan lain-lain), dalam jumlah yang cukup, dan memiliki spesifikasi sesuai standar	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes; GF. APBD-SKPD; Faskes; Mitra
		6.2.2	Dukungan transportasi untuk pengambilan - distribusi - realokasi logistik layanan TB dari dan ke gudang farmasi atau gudang umum	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes, GF. APBD-SKPD Faskes ; Mitra
		6.2.3	Dukungan pemeliharaan-perbaikan- penggantian sarana fasilitas alat dan renovasi, untuk gudang farmasi maupun gudang umum, dalam upaya menjamin kualitas penyimpanan logistik layanan TB	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; GF. APBD-SKPD Mitra

6.2	Logistik Layanan TB				
	6.2.1	Penguatan pencatatan pelaporan kasus TB penerapan wajib lapor semua kasus TB, bagi semua faskes, meliputi adanya pencatatan pelaporan semua kasus TB, baik secara manual maupun secara elektronik	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi ; GF	APBD-SKPD ; Organisasi Faskes ; Mitra
	6.2.2	Dukungan transportasi untuk pengambilan-distribusi-relokasi logistik layanan TB dari dan ke gudang farmasi atau gudang umum	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes ; GF.	APBD-SKPD ; Organisasi Faskes ; Mitra
	6.2.3	Dukungan pemeliharaan-perbaikan- penggantian sarana fasilitas alat dan renovasi, untuk gudang farmasi maupun gudang umum, dalam upaya menjamin kualitas penyimpanan logistik layanan TB	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; GF.	APBD-SKPD Mitra
6.3	Surveilans TB				
	6.3.1	Penguatan pencatatan pelaporan kasus TB penerapan wajib lapor semua kasus TB, bagi semua faskes, meliputi adanya pencatatan pelaporan semua kasus TB, baik secara manual maupun secara elektronik	DKK	Manajemen dan Fungsional faskes ; Organisasi Profesi ; GF	APBD-SKPD ; Organisasi Faskes ; Mitra
	6.3.2	Pemantauan keterlibatan para pemangku kepentingan, swasta dan mitra melalui dokumentasi kegiatan penanggulangan TB oleh para pemangku kepentingan, swasta dan mitra, yang dikumpulkan kepada yang berkepentingan	DKK	Bagian Administrasi Pembangunan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Organisasi Masyarakat, Organisasi Pasien; KEMENHUKHAM; KEMENAG; TNI-POLRI, BPJS Organisasi Profesi; Manajemen faskes; GF	APBD-SKPD ; Organisasi Faskes ; Mitra

	6.3.3	Pemanfaatan teknologi terkini untuk pelaporan kasus TB, mendukung kebijakan wajib lapor semua kasus TB, dengan mengembangkan aplikasi pencatatan- pelaporan kasus TB, berbasis tehnologi terkini, yang mudah dan sederhana, ter-integrasi dengan Semua Instansi kota Pasuruan	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;; Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Organisasi Profesi; GF	APBD-SKPD ; Organisasi ; Mitra
6.4	Penelitian Operasional tentang TB				
	6.4.1	tentang penyebab pasien TB tidak mau berobat	DKK	Bagian Administrasi Pemerintahan; Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, GF	APBD-SKPD ; Organisasi ; Mitra ; CSR
	6.4.2	tentang penyebab pasien TB putus obat	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; APBD-SDPD; Faskes ; Mitra.	
	6.4.3	tentang keterbatasan petugas faskes dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk penanggulangan TB	DKK	Idem	
	6.4.4	tentang pelaksanaan penemuan kasus TB di faskes	DKK	Idem	
	6.4.5	tentang pelaksanaan tatalaksana kasus TB di faskes	DKK	Idem	
	6.4.6	tentang pelaksanaan pemantauan kesinambungan pengobatan kasus TB di faskes	DKK	Idem	
6.5	Pemeliharaan - Perbaikan Sarana - Fasilitas Alat - Bangunan untuk layanan TB				
	6.5.1	pemeliharaan rutin sarana fasilitas alat dan bangunan layanan TB	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajamen faskes , GF	APBD-SKPD ; Faskes ; Mitra

		6.5.2	perbaikan dan penggantian suku cadang fasilitas alat TB yang rusak	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes , GF	
		6.5.3	perbaikan dan penggantian fasilitas alat TB rusak	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes , GF	
		6.5.4	renovasi bangunan layanan TB	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes , GF	
	6.6	Pengembangan layanan TB				
		6.6.1	Menyediakan dukungan untuk pengembangan layanan TB kota Pasuruan meliputi : peningkatan status PS menjadi PPM, pemanfaatan mikroskop teknologi tekini (dilengkapi kamera), pemanfaatan TCM, pengembangan laboratorium rujukan	DKK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; Manajemen faskes , GF	APBD-SKPD

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF